



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 17 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : BUMN/BUMD
LEMBAGA : PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)
UNIT KERJA : Unit Induk Distribusi Bali

I. DATA PRIBADI

1. Nama : I WAYAN UDAYANA
2. Jabatan : GENERAL MANAGER
3. NHK : 207593

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 3.170.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/240 m2 di KAB / KOTA TABANAN, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 106 m2/96 m2 di KAB / KOTA KOTA DENPASAR , HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
3. Tanah Seluas 600 m2 di KAB / KOTA TABANAN, HIBAH TANPA AKTA Rp. 160.000.000
4. Tanah Seluas 200 m2 di KAB / KOTA TABANAN, HASIL SENDIRI Rp. 225.000.000
5. Tanah Seluas 1350 m2 di KAB / KOTA TABANAN, HASIL SENDIRI Rp. 190.000.000
6. Tanah Seluas 315 m2 di KAB / KOTA TABANAN, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 23 m2/23 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 410.000.000
8. Tanah dan Bangunan Seluas 105 m2/60 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 685.000.000
9. Tanah dan Bangunan Seluas 75 m2/75 m2 di KAB / KOTA TABANAN, HASIL SENDIRI Rp. 650.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 705.000.000

1. MOBIL, SUZUKI JEEP Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 105.000.000



2. MOTOR, SUZUKI SEPEDA MOTOR Tahun 2011, HASIL SENDIRI
Rp. 5.000.000
3. MOBIL, NISSAN SERENA HWS/MPV Tahun 2019, HASIL SENDIRI
Rp. 275.000.000
4. MOBIL, MITSUBHISI SUV Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp.
320.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	65.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	480.156.970
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	4.420.156.970
III. HUTANG	Rp.	155.287.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	4.264.869.970

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.